

**PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK OPTIMALISASI
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI *PEKON* PANDAN SARI
KABUPATEN PRINGSEWU PROVINSI LAMPUNG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

AFNAN ZALFA SALSABILAA

NIT. 22314355

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN**

2026

ABSTRACT

Village Treasury Land is a village asset that can be utilized to support development and increase Village Original Revenue. Productive management of Village Treasury Land is expected to provide benefits for both the village government and the community. In Pandan Sari Village, Sukoharjo District, Pringsewu Regency, Village Treasury Land has been utilized through the development of a traditional market, shop houses, and a Food Court. This study aims to analyze the forms and processes of Village Treasury Land management, community participation in its utilization, and its impact on optimizing the local community's economy in Pandan Sari Village.

This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving village officials, village asset managers, and community members. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results indicate that the management of Village Treasury Land in Pandan Sari Village has been carried out productively through the utilization of village assets in the form of a market, shop houses, a Food Court, and other business facilities, contributing to Village Original Revenue. The revenue generated is utilized to support village governance, development programs, and various community activities. In addition, these economic facilities have created business opportunities and increased employment opportunities for the community. However, the economic benefits directly experienced by the people of Pandan Sari Village have not been fully optimized. This condition is due to the fact that most tenants and business operators utilizing these facilities come from outside the village, resulting in relatively limited involvement of local residents in the growing economic activities. Furthermore, some community members are still reluctant to take advantage of the available business opportunities. Nevertheless, the utilization of Village Treasury Land has the potential to promote community economic development if supported by policies that encourage greater participation of local residents in its management and utilization.

Keywords: *Village Treasury Land, Village Asset Utilization, Community Participation, Community Economic Optimization, Village Original Revenue*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Batasan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Kerangka Teoritis.....	17
1. Tanah Desa	17
2. Konsep Tanah Kas Desa (TKD).....	21
3. Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD)	27
4. Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk Optimalisasi Perekonomian Masyarakat	33
5. Partisipasi Masyarakat	35
6. Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	39

7. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa	41
C. Kerangka Pemikiran	43
D. Pertanyaan Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Format Penelitian	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	49
1. Jenis dan Sumber Data	49
2. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	55
E. Jadwal Penelitian	57
BAB IV SEKILAS MENGENAI <i>PEKON</i> PANDAN SARI, KECAMATAN SUKAHARJO,	58
A. Gambaran Umum <i>Pekon</i> Pandan Sari	58
B. Kondisi Geografis <i>Pekon</i> Pandan Sari	60
C. Kondisi Demografi <i>Pekon</i> Pandan Sari	61
D. Kondisi Sosial Ekonomi <i>Pekon</i> Pandan Sari	63
E. Gambaran Umum TKD <i>Pekon</i> Pandan Sari	65
BAB V PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK OPTIMALISASI PEREKONOMIAN	68
A. Pemanfaatan Tanah Kas Desa	68
1. Bentuk Pemanfaatan TKD	68
2. Proses Pengelolaan TKD	73
3. Pihak Yang Terlibat Dalam Pemanfaatan TKD	77
B. Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Tanah Kas Desa	79
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat	79
2. Faktor Yang Mendorong Partisipasi	82
3. Kendala Partisipasi Masyarakat	84
C. Dampak Ekonomi Pemanfaatan Tanah Kas Desa	87
1. Dampak Terhadap Pendapatan Masyarakat	87
2. Dampak Terhadap Kesempatan Kerja	99
3. Dampak Terhadap Pendapatan <i>Pekon</i>	101

BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	107
LAMPIRAN.....	113

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Desa di Indonesia dijadikan sebagai prioritas utama dalam kebijakan nasional demi mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung secara berkelanjutan. Kewenangan yang luas diberikan oleh pemerintah kepada desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 sehingga desa dapat mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan juga kewenangan lokal berskala desa. Kebijakan ini memungkinkan setiap *Pekon* untuk mengelola sumber daya dan potensi lokalnya secara mandiri serta bertanggung jawab demi meningkatkan taraf hidup warganya. Regulasi tersebut menandai pergeseran paradigma pembangunan yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sekadar objek kebijakan dari pemerintah pusat. Salah satu mandat penting dari kebijakan ini adalah penguatan ekonomi desa melalui pengelolaan aset dan sumber daya lokal secara mandiri, berkelanjutan, dan partisipatif (Syaifudin, 2022). Sejalan dengan itu, Pengelolaan Aset Desa menegaskan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan produktivitas dalam setiap bentuk pengelolaan aset desa (Yudaruddin et al., 2023). Dengan demikian, tata kelola aset desa yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan desa yang mandiri secara ekonomi, kuat secara sosial, dan berdaya saing berdasarkan potensi lokal yang dimiliki.

Implementasi kebijakan tersebut pada tingkat desa menempatkan aset desa sebagai elemen penting yang berperan sebagai sumber pendapatan asli desa (PADes). Salah satu aset strategis yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah tanah kas desa. Tanah kas desa mempunyai peran yang melampaui fungsi administratif semata karena tanah tersebut juga dapat menjadi sumber ekonomi yang produktif bilamana dikelola dengan cara yang sesuai. Pemanfaatan tanah ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti penyediaan area untuk aktivitas pertanian dan juga kegiatan perdagangan serta

penyediaan fasilitas publik contohnya pasar desa dan juga ruang usaha mikro. Menurut (Suparlan et al., 2024) pengelolaan tanah kas desa yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta memperluas kesempatan kerja dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa. Sebaliknya, jika tidak dikelola secara produktif, aset ini hanya menjadi potensi yang terabaikan dan tidak memberikan nilai tambah bagi desa. Tanah kas desa merupakan bagian dari aset *Pekon* yang berupa tanah milik pemerintah desa dan digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu kategori tanah milik desa maka tanah kas desa dimanfaatkan untuk keperluan publik serta peningkatan pendapatan asli desa sambil menjalankan peran sosial yang penting demi keberlangsungan pemerintahan dan juga pembangunan di tingkat desa. Status hukum tanah kas desa biasanya berupa hak pakai atas nama Pemerintah desa, yang hanya dapat dimanfaatkan dan digunakan dengan tidak menghilangkan status kepemilikannya, serta tidak dapat dipindah tangan kecuali untuk kepentingan umum dan kepentingan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memperkuat pengelolaan tanah kas desa, berbagai desa di Indonesia telah menerapkan praktik yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakatnya. Di sejumlah desa di Yogyakarta dan Jawa Tengah, tanah kas desa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif berbasis pertanian, peternakan, maupun penyediaan ruang usaha warga. Ada pula desa yang memanfaatkan tanah kas desa sebagai pusat aktivitas ekonomi seperti pasar tradisional, area kuliner, serta fasilitas perdagangan yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa. Namun di beberapa daerah, pemanfaatan tanah kas desa masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan manajemen, belum optimalnya partisipasi masyarakat, hingga potensi konflik kepentingan akibat tata kelola yang belum transparan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kapasitas kelembagaan desa dan strategi pengelolaan yang dijalankan sangat menentukan bagaimana tanah kas desa dimanfaatkan.

Pemanfaatan aset desa di tingkat lokal sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Di lokasi penelitian pasar tradisional serta area alun-alun dan juga ruko berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi warga. Praktik ini kemudian membuka kesempatan usaha yang baru sembari memperluas lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat. Namun di sisi lain, kondisi tersebut memunculkan tantangan dalam hal pengelolaan kebersihan lingkungan, pengaturan tata ruang usaha, serta keadilan dalam sistem penyewaan lahan dan bangunan yang dikelola pemerintah desa. Tantangan ini menuntut adanya sistem tata kelola yang transparan, partisipatif, dan akuntabel agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat (Cahyana, 2022). Selain itu, potensi konflik kepentingan juga dapat muncul apabila proses pemanfaatan aset desa tidak dilandasi prinsip keadilan dan kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Ohoiwutun *et al.*, (2024) Dengan demikian, pengelolaan tanah kas desa bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga berkaitan dengan penguatan kelembagaan sosial, pembentukan tata kelola yang baik, serta pengembangan etika bersama dalam mengelola sumber daya publik di tingkat desa.

Setiap desa memiliki potensi dan tantangan yang berbeda dalam mengelola aset *Pekonnya*, bergantung pada kapasitas serta strategi pengelolaan yang diterapkan oleh masing-masing pemerintahan desa (Rukmana et al., 2024). *Pekon Pandan Sari* yang terletak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, merupakan salah satu *Pekon* yang memanfaatkan tanah kas desa dengan optimal dibandingkan dengan *Pekon-Pekon* lain di wilayah tersebut. Sehingga urgensi dalam penelitian ini yakni pada *Pekon Pandan Sari* sendiri menjadi potensi strategis yang dimanfaatkan oleh pemerintah *Pekon* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pemanfaatan aset lokal. Berbeda dengan beberapa *Pekon* lain di Kecamatan Sukoharjo yang belum mampu mengelola tanah kas *Pekonnya* secara maksimal, *Pekon Pandan Sari* telah menunjukkan langkah progresif dengan menjadikan aset tersebut sebagai sumber kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Tanah kas desa dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas ekonomi warga melalui

pembangunan pasar tradisional yang ramai dikunjungi dan menjadi pusat perputaran ekonomi masyarakat setempat. Di kawasan alun-alun *Pekon*, pemerintah *Pekon* juga menyediakan ruang usaha bagi masyarakat yang bergerak di bidang kuliner, sehingga kawasan ini berkembang menjadi tempat interaksi sosial dan ekonomi yang hidup. Selain itu, sejumlah bangunan usaha yang dikelola oleh pemerintah *Pekon* dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah sebagai wadah untuk mengembangkan kegiatannya. Keberadaan fasilitas-fasilitas tersebut tidak hanya meningkatkan dinamika ekonomi warga, tetapi juga memperkuat hubungan sosial serta menghidupkan kembali peran ruang publik di tingkat desa (Samsul et al., 2023). Seperti dijelaskan oleh Afifah, Suparman dan Setiadi (2024) pengelolaan tanah kas desa yang melibatkan masyarakat secara aktif mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap aset desa serta memperkuat partisipasi warga dalam proses pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Dengan demikian, praktik pengelolaan tanah kas desa di Pandan Sari mencerminkan bentuk nyata implementasi otonomi desa dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan bersama.

Namun beberapa permasalahan spesifik dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa di *Pekon* Pandan Sari yang perlu dikaji secara mendalam. Pertama, meskipun pemanfaatan tanah kas desa sudah berjalan, namun belum ada analisis yang komprehensif mengenai sejauh mana pemanfaatan tersebut telah optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat secara menyeluruh. Kedua, belum adanya data yang terukur mengenai kontribusi konkret pemanfaatan tanah kas desa terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa tersebut.

Menurut data dari Pemerintah *Pekon* Pandan Sari dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Pekon* (DPMD) Kabupaten Pringsewu, kegiatan pemanfaatan tanah kas *Pekon* telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan *Pekon* serta kesejahteraan masyarakat setempat. Pemanfaatan aset *Pekon* dalam bentuk kegiatan ekonomi lokal menunjukkan bahwa tanah kas desa dapat berfungsi sebagai instrumen penting

dalam mendorong pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Afifah et al., 2024). Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tanah kas desa selanjutnya dialokasikan untuk mendukung berbagai program pembangunan sosial dan peningkatan kualitas infrastruktur publik di tingkat desa. Selain itu, sebagian hasil pengelolaan juga digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan desa, dan pengembangan usaha mikro berbasis komunitas (Harini et al., 2023). Melalui upaya tersebut, *Pekon Pandan Sari* tidak hanya berhasil meningkatkan kemandirian ekonomi, tetapi juga memperkuat semangat gotong royong serta partisipasi warga dalam pembangunan berbasis potensi lokal. Kondisi ini menjadi cerminan dari model pengelolaan aset desa yang efektif dan inklusif dalam kerangka pemberdayaan masyarakat perekonomian.

Praktik pengelolaan aset desa yang produktif seperti di Pandan Sari memberikan pelajaran penting bagi pembangunan ekonomi desa di Indonesia. Pemanfaatan tanah kas desa menjadi topik yang krusial karena tindakan tersebut merupakan perwujudan nyata dari kemandirian ekonomi serta penerapan langsung prinsip otonomi desa yang diamanatkan dalam kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks pembangunan desa di Indonesia masih banyak desa yang bergantung pada dana transfer pemerintah pusat seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa sehingga kapasitas desa dalam mengelola sumber daya lokal secara mandiri masih terbatas. Upaya pemanfaatan tanah kas desa menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan tersebut sekaligus memperkuat posisi desa sebagai subjek pembangunan yang berdaya. Tanah kas desa yang dikelola secara produktif tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan asli desa, tetapi juga dapat menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis potensi lokal (Aisyah, 2024). Selain itu, pengelolaan aset desa yang berorientasi pada keberlanjutan dapat memperkuat struktur ekonomi desa melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya secara mandiri (Hajar, 2025). Namun, pada kenyataannya masih banyak desa di Indonesia yang belum mampu mengoptimalkan aset tanah kas desa akibat keterbatasan manajemen, lemahnya perencanaan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Oleh karena

itu, praktik pengelolaan tanah kas desa di *Pekon Pandan Sari* menjadi relevan untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai model pengelolaan aset desa yang berkelanjutan, partisipatif, dan berbasis pada potensi lokal masyarakat.

Optimalisasi perekonomian masyarakat dipilih sebagai fokus penelitian karena merupakan tujuan utama yang ingin dicapai melalui pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai aset produktif desa. Pengelolaan aset desa pada hakikatnya tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), tetapi juga untuk menciptakan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui peningkatan kesempatan berusaha, perluasan lapangan kerja, dan penguatan aktivitas ekonomi lokal. Oleh karena itu, keberhasilan pemanfaatan Tanah Kas Desa perlu dilihat dari sejauh mana aset tersebut mampu mengoptimalkan potensi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Pemilihan fokus pada optimalisasi perekonomian masyarakat bukan berarti mengabaikan pentingnya aspek hukum dan tata kelola dalam pengelolaan tanah kas desa. Namun, penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa aspek ekonomi merupakan dampak yang paling langsung dan nyata dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Aspek hukum seperti status kepemilikan, regulasi pemanfaatan, dan legalitas pengelolaan tanah kas desa pada dasarnya berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur bagaimana aset tersebut harus dikelola (Wirawan et al., 2022). Sementara itu, aspek tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan mekanisme prosedural untuk memastikan pengelolaan berjalan sesuai aturan. Kedua aspek tersebut, meskipun sangat penting, pada akhirnya merupakan instrumen untuk mencapai tujuan substantif yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Harini et al., 2023).. Dalam konteks pembangunan desa, keberhasilan pengelolaan aset desa tidak hanya diukur dari seberapa baik tata kelolanya atau seberapa kuat landasan hukumnya, tetapi lebih kepada sejauh mana pengelolaan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan (Yudaruddin et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada dimensi ekonomi sebagai *outcome* utama yang ingin

dicapai, dengan tetap mempertimbangkan aspek hukum dan tata kelola sebagai enabler atau faktor pendukung pencapaian tujuan ekonomi tersebut.

Untuk mengukur keberhasilan optimalisasi perekonomian masyarakat dalam pemanfaatan tanah kas desa, diperlukan indikator yang jelas dan terukur. Merujuk pada Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dalam Indeks *Pekon* Membangun (Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016), indikator optimalisasi perekonomian masyarakat meliputi: (1) keragaman produksi masyarakat *Pekon* yang menunjukkan diversifikasi ekonomi; (2) tersedianya pusat pelayanan perdagangan sebagai wadah aktivitas ekonomi lokal; (3) akses distribusi dan logistik yang memadai; (4) akses ke lembaga keuangan dan perkreditan untuk penguatan modal usaha; (5) keberadaan dan aktivitas lembaga ekonomi seperti koperasi atau kelompok usaha; serta (6) keterbukaan wilayah yang mendukung mobilitas ekonomi. Selain itu, indikator lain yang relevan mencakup peningkatan pendapatan masyarakat, pertumbuhan jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), penyerapan tenaga kerja lokal, serta kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat komunitas (Harini et al., 2023). Indikator-indikator ini akan menjadi kerangka pengukuran dalam menganalisis dampak pemanfaatan tanah kas desa terhadap perekonomian masyarakat di *Pekon* Pandan Sari. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi model nyata yang dapat diterapkan oleh *Pekon-Pekon* lain di Kabupaten Pringsewu yang mempunyai aset serupa tetapi belum digunakan secara maksimal.

Berdasarkan serangkaian temuan penelitian serta bukti empiris yang telah terhimpun, pengelolaan tanah milik desa memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal dan upaya penguatan kapasitas masyarakat. Namun kajian yang lebih komprehensif masih sangat diperlukan untuk mengungkap secara rinci bagaimana mekanisme pengelolaan itu diterapkan di lapangan dengan cara memperhatikan dimensi sosial serta ekonomi dan juga unsur budaya yang melekat pada komunitas setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara menyeluruh berbagai strategi dalam memanfaatkan tanah milik desa

yang berada di *Pekon* Pandan Sari serta bagaimana warga setempat ikut serta mengelola lahan tersebut dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi di daerah sekitar. Hasil yang diperoleh dari studi ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran secara teoretis untuk memperkaya pemahaman tentang pengelolaan aset desa yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat di samping memberikan keuntungan praktis bagi aparatur desa agar potensi kekayaan desa dapat dimaksimalkan dengan cara yang lestari. Khotimah dan Mariana (2023), menegaskan bahwa ekonomi desa yang dibangun secara berkelanjutan wajib didasarkan pada potensi setempat dan keterlibatan warga secara langsung serta tata kelola aset yang dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas.

Pemanfaatan tanah kas desa di *Pekon* Pandan Sari merupakan subjek penelitian yang krusial karena *Pekon* ini memperlihatkan pengelolaan aset yang lebih maju dibandingkan dengan *Pekon-Pekon* lainnya di Kecamatan Sukoharjo. Keberadaan pasar tradisional dan area alun-alun yang dilengkapi zona kuliner serta bangunan ruko yang dikelola oleh pemerintah *Pekon* menjadi bukti konkret dari optimalisasi penggunaan tanah kas desa guna mendorong kegiatan ekonomi di tingkat lokal. Kondisi ini menciptakan fenomena yang menarik untuk dikaji, yaitu bagaimana pemanfaatan aset desa dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus sumber pendapatan asli desa yang berkelanjutan. Permasalahan spesifik yang menjadi fokus penelitian adalah analisis mengenai bagaimana optimalisasi perekonomian masyarakat dapat dicapai melalui pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa, dengan mempertimbangkan aspek strategi pemanfaatan, pola partisipasi masyarakat, serta dampak ekonomi yang dihasilkan bagi kesejahteraan masyarakat *Pekon* Pandan Sari. Berbagai pengalaman yang telah diamati menjadikan kajian tentang pemanfaatan tanah kas desa oleh *Pekon* Pandan Sari sebagai suatu hal yang menarik untuk dilakukan sehingga pertumbuhan ekonomi lokal dapat didorong dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui tanah kas desa yang dimiliki tersebut.

Pemanfaatan Tanah Kas Desa di *Pekon* Pandan Sari terbukti memiliki peran strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi warga serta

memperkuat kemandirian *Pekon* melalui pengelolaan aset yang produktif dan transparan serta partisipatif. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *Pekon* Pandan Sari mampu menerapkan prinsip otonomi desa secara konkret dengan mengoptimalkan potensi lokal yang tersedia. Peneliti kemudian memutuskan untuk menjalankan sebuah studi yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Kas Desa di *Pekon* Pandan Sari untuk Optimalisasi Perekonomian Masyarakat” dengan maksud menelaah secara menyeluruh strategi pengelolaan, bentuk partisipasi masyarakat, serta dampak ekonomi yang dihasilkan dari pemanfaatan aset tersebut.

B. Rumusan Masalah

Pemanfaatan Tanah Kas Desa menjadi salah satu instrumen strategis untuk mendukung kemandirian ekonomi *Pekon* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif tanah kas desa memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara produktif dan transparan serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya tanah milik desa di sejumlah daerah ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal karena perencanaan yang terbatas dan tata kelola yang lemah serta distribusi keuntungan ekonomi yang belum menyeluruh bagi warga desa sehingga potensi besar dari aset tersebut belum mampu memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan kolektif dan keberlanjutan pembangunan pedesaan.

Di *Pekon* Pandan Sari, Tanah Kas desa telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti penyediaan lahan pasar, ruko, serta area usaha masyarakat yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa dan aktivitas ekonomi lokal. Meskipun demikian, belum terdapat kajian yang secara komprehensif menggambarkan bagaimana proses pengelolaan tanah kas desa tersebut dijalankan, sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam pemanfaatannya, serta bagaimana dampak nyata pemanfaatan tanah kas desa terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan yang muncul dari situasi tersebut adalah apakah penggunaan Tanah Kas Desa di *Pekon* Pandan Sari sudah dilaksanakan dengan cara yang optimal

dan adil lalu apakah keuntungan ekonominya sudah dinikmati secara setara oleh seluruh warga.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena pengelolaan Tanah Kas Desa tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut tata kelola aset desa, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan pembangunan desa. Tanpa pemahaman yang utuh mengenai proses, partisipasi, dan dampak pemanfaatan Tanah Kas Desa, potensi aset desa berisiko tidak dimanfaatkan secara maksimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji secara mendalam pemanfaatan Tanah Kas Desa di *Pekon* Pandan Sari sebagai upaya optimalisasi perekonomian masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk dan proses pengelolaan tanah kas desa di *Pekon* Pandan Sari guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat?
2. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah kas desa di *Pekon* Pandan Sari?
3. Apa dampak pemanfaatan tanah kas desa terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat *Pekon* Pandan Sari?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan bentuk dan proses pemanfaatan tanah kas desa di *Pekon* Pandan Sari guna mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Mengidentifikasi dan menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan tanah kas desa di *Pekon* Pandan Sari?
3. Menganalisis dampak pemanfaatan tanah kas desa terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat *Pekon* Pandan Sari

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan kegunaan yang bersifat teoretis sekaligus praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- b. Memberikan bantuan dalam memajukan pengetahuan di bidang pengelolaan aset desa serta pembangunan pedesaan dan juga pemberdayaan masyarakat yang berlandaskan pada potensi lokal.
- c. Memperluas literatur serta studi ilmiah yang membahas penggunaan tanah kas desa dalam kerangka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus upaya memperkuat kemandirian Masyarakat desa setempat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah *Pekon* Pandan Sari temuan dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk merumuskan kebijakan serta strategi dalam mengelola tanah kas desa secara lebih produktif dan transparan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Bagi masyarakat yang berada di *Pekon* Pandan Sari penelitian ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman mereka mengenai potensi tanah kas desa sebagai fondasi kesejahteraan bersama sehingga partisipasi aktif dalam pengelolaan tanah tersebut dapat terus didorong dan ditingkatkan.
- c. Bagi Pemerintah Daerah atau Kecamatan Sukoharjo, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan aset desa di wilayah lain, sehingga terbentuk model praktik baik (*best practice*) yang dapat direplikasi.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi dasar empiris dan konseptual untuk studi lanjutan mengenai inovasi pengelolaan aset desa, pembangunan ekonomi lokal, dan strategi pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan pada pengkajian tentang penggunaan aset berupa Tanah Kas Desa yang berlokasi di *Pekon* Pandan Sari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu sebagai properti desa yang dimanfaatkan untuk menopang kegiatan perekonomian masyarakat. Fokus studi diarahkan

pada cara pemanfaatan tanah milik desa yang dikelola oleh pemerintahan setempat seperti pasar tradisional dan area usaha kuliner yang ada di alun-alun *Pekon* serta bangunan ruko yang dipergunakan oleh penduduk. Kajian ini memusatkan perhatian pada tiga bagian utama, yaitu:

- a. Bentuk dan proses pengelolaan tanah kas desa di *Pekon* Pandan Sari dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
- b. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan tanah kas desa.
- c. Dampak pemanfaatan tanah kas desa terhadap perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat *Pekon* Pandan Sari.

Penelitian ini sama sekali tidak mengupas tuntas mengenai hukum pertanahan yang mencakup status kepemilikan tanah hingga sengketa tanah serta proses sertifikasi tanah kas desa melainkan memusatkan perhatian pada cara aset desa digunakan untuk memberdayakan dan mengerek perekonomian masyarakat. Cakupan studi ini pun dibatasi hanya pada situasi pemanfaatan tanah kas desa yang terjadi selama periode riset berjalan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk dan proses pengelolaan Tanah Kas Desa di *Pekon* Pandan Sari telah dilakukan secara produktif melalui pemanfaatan aset desa untuk kegiatan ekonomi masyarakat. Pemanfaatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pasar tradisional serta ruko kemudian *Food Court* dan juga area usaha di kawasan alun-alun yang menjadi pusat perkumulan melalui sistem penyewaan kepada masyarakat. Pengelolaan dilakukan dengan tetap mempertahankan status tanah sebagai aset desa serta memperhatikan prinsip kemanfaatan bagi masyarakat dan *Pekon*.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Tanah Kas Desa di *Pekon* Pandan Sari terlihat melalui keterlibatan masyarakat sebagai penyewa seperti ruko, pasar, *Food Court* serta usaha yang memanfaatkan berbagai fasilitas ekonomi yang tersedia.
3. Pemanfaatan Tanah Kas Desa di *Pekon* Pandan Sari telah memberikan dampak terhadap perkembangan aktivitas ekonomi *Pekon* dan kesejahteraan masyarakat, meskipun pengaruhnya belum dirasakan secara langsung oleh sebagian besar masyarakat setempat. Berdasarkan hasil analisis data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai pasar, ruko, dan *Food Court* terbukti memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat melalui terbukanya kesempatan berusaha, bertambahnya peluang kerja, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang berkontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, analisis juga menunjukkan bahwa manfaat ekonomi tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat *Pekon* Pandan Sari karena sebagian besar unit usaha masih dikelola oleh penyewa yang berasal dari luar *Pekon*, sehingga tingkat partisipasi masyarakat lokal dalam memanfaatkan aset desa masih relatif terbatas. Dengan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa tetap memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung melalui

pendapatan *Pekon* yang digunakan untuk mendukung pembangunan, pemeliharaan fasilitas umum, dan berbagai kegiatan kemasyarakatan.

B. Saran

1. Penyusunan dan penetapan Peraturan Desa atau Perdes yang secara spesifik mengatur tata kelola serta penggunaan Tanah Kas Desa sangat disarankan bagi Pemerintah *Pekon* Pandan Sari karena aturan tersebut akan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa. Keberadaan peraturan ini dinilai krusial untuk mempertegas mekanisme pemanfaatan tanah kas desa di samping hak dan kewajiban para penyewa kemudian sistem pengelolaan serta pengawasan terhadap seluruh aset milik desa. Dengan adanya landasan hukum yang jelas maka seluruh proses pemanfaatan aset dapat berjalan lebih terarah dan akuntabel demi kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Selain itu, Peraturan Desa juga dapat menjadi dasar dalam mengoptimalkan pemanfaatan Tanah Kas Desa agar lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal dan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Dengan adanya aturan yang jelas, pengelolaan Tanah Kas Desa diharapkan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan *Pekon* serta kesejahteraan masyarakat *Pekon* Pandan Sari.
2. Masyarakat *Pekon* Pandan Sari diharapkan dapat lebih memanfaatkan peluang ekonomi yang telah tersedia melalui pemanfaatan Tanah Kas Desa. Keberadaan pasar, ruko, dan foodcourt yang dibangun di atas aset desa merupakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kegiatan usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Oleh karena itu, masyarakat didorong untuk memperkuat motivasi dan kepercayaan diri serta kesadaran agar mereka dapat berpartisipasi dalam beragam aktivitas ekonomi yang ada sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Partisipasi masyarakat yang lebih giat ini akan membuat Tanah Kas Desa tidak sekadar menjadi sumber pendapatan bagi *Pekon* melainkan juga mampu memberikan dampak yang lebih luas dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga *Pekon* Pandan Sari.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjar, K. A. H., Rusliyadi, M., Zaenurrosyid, A., Rumata, N. A., Nirwana, I., & Abadi, A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Praktis untuk Analisis Data Kualitatif dan Studi Kasus*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Afifah, S. N. N., Suparman, A. N., & Setiadi, B. (2024). Optimalisasi Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Bumireja Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. *Jurnal Otonomi*, 1(1 SE-Articles), 151–164.
- Aisyah, S. (2024). *Pengelolaan tanah kas desa untuk peningkatan pendapatan asli desa di Kalurahan Purwodadi, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Aminatun Khoiriyah, S., Maghfur, I., & Dayat, M. (2024). Analisis Akad Ijarah Tanah Kas Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dalam perspektif fikih muamalah. *EL-MAL*, 5(9). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i9.2779>
- Andriyani, S., Rahman, A., & Wahyuningsih, W. (2024). Pemanfaatan Tanah Kas Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), n/a-n/a. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.258>
- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode penelitian kualitatif dan kuantitatif: Pendekatan metode kualitatif dan kuantitatif di berbagai bidang*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aurora, C., Nelli, T., & Krismantoro, D. (2023). Abuse of village treasury land use in the Yogyakarta Special Region since the enactment of Law Number 13 of 2012 concerning specialties of the Yogyakarta Special Region. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(12). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i12-106>
- BPS-Statistics Indonesia. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023. In Indah Budiati (Ed.), *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023* (pp. 1–230). Badan Pusat Statistik.
- Cahyana, I. N. (2022). Kebijakan pemanfaatan tanah kas desa (TKD) dan upaya perlindungan hukumnya bagi masyarakat dan pemerintah Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang yang memberi keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan kepastian

- hukum. *HPPH: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 1(2).
<https://doi.org/10.25105/hpvh.v1i2.5550>
- Chatra, A., Dirna, F. C., Alhakim, R., Pujiriyani, D. W., Rosardi, R. G., Maulinda, I., Octaviani, T., Efitra, E., Hudang, A. K., & Latif, E. A. (2025). *Potensi Dan Sektor Unggulan Ekonomi Desa*. PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3rd (ed.)). SAGE Publications.
- Coleman, J. S. (1988). Social capital in the creation of human capital. *American Journal of Sociology*, 94, S95–S120. <https://doi.org/10.1086/228943>
- de Vries, W. T., Bugri, J., & Mandhu, F. (2020). *Advancing responsible and smart land management BT - Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Decentralization, E. (2024). Implementasi Desentralisasi Dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Mandiri Di Indonesia. *Jurnal Professional*, 11(2), 609–614.
- Desa Pandan Sari. (2025). *Pemerintah Desa Pandan Sari*. OpenSID.
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi Dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- DIY, G. (2017). *Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa*.
- Firdaus, A. S. Z. (2022). *Transparansi pengelolaan tanah kas desa di Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Gubernur DIY. (2017). *Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten*.
- Gunawan, M. S., & Karina, S. (2023). Pandangan yuridis terkait sistem pengolahan tanah kas desa. *Unes Law Review*, 6(2). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1450>
- Hajar, S. (2025). *Pemanfaatan tanah kas kalurahan oleh petani penggarap untuk meningkatkan pendapatan di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Haji, L., Valizadeh, N., & Hayati, D. (2021). *The role of local communities in sustainable land and forest management BT - Advances in Social Science, Education and*

- Humanities Research* (pp. 1–18).
- Harefa, E. W. (2024). *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 (Studi Kasus Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor)*. Universitas Kristen Indonesia.
- Harini, N., Suhariyanto, D., & Indriyani, I. (2023). Pendampingan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian desa. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(2). <https://doi.org/10.37680/amalee.v4i2.2834>
- Hasanah, S., Jiwantara, F. A., & Lukman, L. (2022). Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Journal of Community Empowerment*, 1(2). <https://doi.org/10.31764/joce.v1i2.12447>
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Indonesia, K. D. N. R. (2024). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa* (Berita Negara Republik Indonesia, Vol. 227).
- Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan LN Nomor 5495.
- Isarapu, N. (2024). *Fostering inclusive land governance: Insights from community-led mapping of common lands in Rajasthan, India BT - Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Istifani, N. A., & Prananingtyas, P. (2022). Pengelolaan dan pemanfaatan aset desa melalui perjanjian bangun guna serah (Build, Operate and Transfer/BOT). *Notarius*, 15(2). <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.37141>
- Judijanto, L., Atmaja, U., Irawati, I., Juhandi, D., Kusumastuti, S. Y., & Chaniago, N. (2025). *Ekonomi Pembangunan Pedesaan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Khotimah, K., & Mariana, M. (2023). Membangun keunggulan ekonomi lokal melalui pemberdayaan kelompok wanita tani di Desa Pulosari Kecamatan Jambon. *Assoeltan Journal*, 1(3). <https://doi.org/10.70610/assoeltan.v1i3.235>
- Liu, S. (2023). *The circulation and market development of rural land contractual management rights BT - Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.

- Maros, A., Hasdani, H., & Zakariya, H. (2020). Analisis Pengamanan dan Pemanfaatan Tanah Desa Berdasarkan Peraturan Desa Sapta Mulia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Studi di Desa Sapta Mulia Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo). *Wajah Hukum*, 4(2), 229. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i2.214>
- Mudi, V. A., & Nuragifah, N. (2024). Analisis kepastian hukum atas status kepemilikan tanah kas desa sebagai aset pemerintahan desa. *RIO Law Jurnal*, 6(1). <https://doi.org/10.36355/rlj.v6i1.1621>
- Ohoiwutun, Y. A., Rato, D., Harindinata, A., Khawarizmi, U. F., & Zainudin. (2024). Konflik Kepentingan dalam Pengelolaan Tanah Kas Desa Tinjauan Hukum terhadap Penebangan Tanaman di Desa Pace, Kabupaten Jember. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2 SE-Articles), 9. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1894>
- Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton University Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- R Arnstein, S. (1969). A Ladder Of Citizen Participation-Sherry R Arnstein "A Ladder Of Citizen Participation. *Journal Of The American Institute Of Planners*, 35(4), 216–224.
- Redin. (2022). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Desa (Studi di Desa Sungai Seria Kecamatan Ketunggau Hulu Kabupaten Sintang). *Perahu: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.51826/perahu.v10i2.687>
- Rezky, R. (2024). *Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Pertanian, Peternakan & Perkebunan Sebagai Sumber Pendapatan Pemerintah Daerah Kota Palopo*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Rifa'i, A. (2020). Implementasi Penggunaan Tanah Bengkok Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Lampung Timur. In *IAIN Metro Digital Repository*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Rineksi, T. W., Amrin, R. N., Ayu, S. S., Kuncoro, D. M., Anggorowati, D. F., Khoirunisa, L. Q., & Bhagaskara, R. P. (2024). Instrumen Pelaporan dalam Rangka Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Tunas Agraria*, 7(2), 263–284. <https://doi.org/10.31292/jta.v7i2.312>

- Rizqi, I. T., Ariani, D., & Pelly, D. A. (2025). Analisis Dampak Pemanfaatan Perkembangan Tanah Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Psikososial Dan Pendidikan*, 1(2), 863–875.
- Rukmana, N. S., Syam, F., Umar, N. F., Sakawati, H., & Johansyah, O. N. P. (2024). Pelatihan Pengelolaan Aset Desa Bagi Aparat Desa Di Desa Sumbang Kecamatan Curio. *PJPM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2). <https://doi.org/10.62330/pjpm.v1i02.69>
- Saidin, S., Wati, A. M., & Pratama, R. A. (2024). Fungsi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pertanahan : Studi Desa Alebo Kecamatan Konda. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 4(1 SE-Articles), 63–74. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i1.7>
- Samsul, S., Gurusi, L., & Satria, E. (2023). Mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi Desa Watiginanda. *Anoa Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.51454/anoa.v2i01.445>
- Shi, Y. (2023). *The value of participatory mapping, the role of the adat community (Masyarakat Adat), and the future of the peatlands BT - Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Styaningsih, R. U., Destyarini, N., & Aryono, A. (2023). Implementasi pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3478>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi terbaru)*. Alfabeta.
- Suparlan, O. (2024). *Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus di Kalurahan Sukoreno, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo)*. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD".
- Suparlan, O., Sugiyanto, S., & Jati, M. P. W. (2024). Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3 SE-Articles), 679–684. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i3.3074>
- Syaifudin, R. (2022). Optimalisasi BUMDes dalam upaya mendorong ekonomi desa.

- Dinamika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 9(1).
<https://doi.org/10.62870/dinamika.v9i1.17342>
- Syarifudin, A., & Astuti, S. (2020). Strategi pengembangan BUMDes dalam optimalisasi potensi ekonomi desa dengan pendekatan social entrepreneur di kabupaten kebumen. *Research Fair Unisri*, 4(1). <https://doi.org/10.33061/rsfu.v4i1.3400>
- Tavares, A. F. (2023). *Land use management: Local institutions and the power to shape BT - Advances in Social Science, Education and Humanities Research*.
- Turut, D. R., & Mujiburohman, D. A. (2023). Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Dusun Sukunan, Yogyakarta. *Abdimasku*, 6(2). <https://doi.org/10.33633/ja.v6i2.956>
- Varwell, S. (2022). A Literature Review of Arnstein's Ladder of Citizen Participation: Lessons for contemporary student engagement. *Exchanges: The Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 108–144. <https://doi.org/10.31273/eirj.v10i1.1156>
- Wirawan, F., Sutarni, N., & Hidayat, M. F. (2022). Pengelolaan tanah kas desa oleh kepala desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa (Studi kasus di Desa Pusporenggo Kecamatan Musuk Kabupaten Boyolali). *Jurnal Bedah Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.36596/jbh.v6i2.684>
- Yudaruddin, R., Hilmawan, R., & Aprianti, Y. (2023). Rural development from village funds, village-owned enterprises, and village original income. *Journal of Open Innovation*, 9(10), 100159. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100159>